

Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pantti Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Muhammad Aldi Lubis ¹⁾

¹⁾ Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Author's Correspondence : ¹⁾ aldymuhammad82@yahoo.co.id

ABSTRACT

The number of Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), especially Homeless people and Beggars in West Java Province is increasing. The number of Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), especially Homeless people and Beggars in West Java Province is increasing in resolving poverty problems in the homeless and beggar categories which have physical, mental and spiritual guidance programs, individual social guidance. Knowing the results of the policy evaluation of the homeless and beggar program and to find out the efforts made by the orphanage in evaluating program policies and factors hindering program policy evaluation. The method used in this research is qualitative and data collection techniques are carried out by direct observation in the field, in-depth interviews, and documentation. The results of the research show that the program implementation activities that are applied to homeless people and beggars are in the form of services and rehabilitation, including through various guidance activities, both in the form of spiritual, physical, social, mental and skills guidance and the program is considered ineffective because there are still clients after training returns to the streets The Orphanage evaluates in early 2020 to the new management and has applied direct work distribution to clients and also provides a rented house for the first year to be paid by the orphanage, it is hoped that after it is distributed to the work place.

Keywords: Policies Evaluation, Social Rehabilitation Home Programs, Homeless People and Beggars

ABSTRAK

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan pada kategori gelandangan dan pengemis yang memiliki program pembinaan jasmani, mental dan rohani, pembinaan sosial perorangan. Mengetahui hasil evaluasi kebijakan program gelandangan dan pengemis serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak pantti asuhan dalam mengevaluasi kebijakan program dan faktor penghambat evaluasi kebijakan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pelaksanaan program yang di terapkan kepada gelandangan dan pengemis adalah berupa pelayanan dan rehabilitasi diantaranya melalui berbagai kegiatan bimbingan baik berupa bimbingan rohani, jasmani, sosial, mental dan keterampilan dan program tersebut dirasa kurang efektif karena masih ada klien pasca pelatihan kembali ke jalanan. Pihak Pantti Asuhan melakukan evaluasi di awal tahun 2020 kepada pengurus yang baru dan sudah menerapkan penyaluran kerja secara langsung kepada klien dan juga memberikan rumah kontrakan selama satu tahun pertama yang akan dibiayai oleh pihak pantti.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tinggal, Gelandangan dan Pengemis

Article History:

Received; 16-08-2024; Revised; 20-07-2024; Accepted; 13-08-2024



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis salah satu permasalahan sosial yang bisa menjadi ancaman dan hambatan dalam pembangunan Nasional, dengan pengentasan kemiskinan serta upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. Gepeng dasarnya adalah warga masyarakat yang tergolong fakir miskin dan melakukan urbanisasi untuk menjalani kehidupannya.

Gepeng biasanya terdiri dari usia produktif serta latar belakang pendidikan dan kemampuan yang cukup rendah, sehingga mereka tidak mampu bersaing dan tersisih dari persaingan hidup yang tajam. Dalam menjalani kehidupan, mereka tidak lagi memperdulikan tatanan nilai/norma bahkan agama sehingga mengarah pada perbuatan tercela dan dapat mengakibatkan terganggunya keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Karena permasalahan diatas tentunya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial Bab I Pasal I ayat 8 menyatakan bahwa salah satu program pemerintah adalah rehabilitasi sosial. Menurut Rehabilitasi sosial adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat 1 Rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Gelandangan pengemis harus segera ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Salah satunya yaitu melalui rehabilitasi sosial di setiap daerah provinsi termasuk Jawa Barat yang mendominasi banyaknya gepeng

Sebagai wadah Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK) Cisarua Bandung Barat. Panti ini bertugas untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya gelandangan dan pengemis.

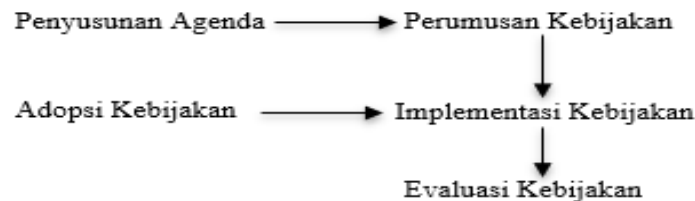
Bagaimana hasil evaluasi kebijakan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang menghambat evaluasi kebijakan program, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Panti dalam mengevaluasi kebijakan program di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK) Cisarua, Kabupaten Bandung? Tujuannya adalah untuk memahami hasil evaluasi kebijakan pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat evaluasi kebijakan, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Panti dalam mengevaluasi kebijakan program tersebut.

Kajian Pustaka

Menurut Pasolong dalam **Teori Administrasi Publik** (2019), kebijakan adalah serangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program, dan keputusan yang diambil oleh aktor terkait untuk memecahkan permasalahan. Kebijakan mencakup alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip tertentu dan merupakan hasil analisis mendalam untuk menentukan alternatif terbaik. Kebijakan publik bertujuan menciptakan kondisi kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan menekankan nilai, norma, dan etika sebagai dasar moral praktik pemerintahan serta menentukan arah tujuan yang ingin dicapai.



Evaluasi kebijakan publik, menurut Dunn (2015), adalah proses yang melibatkan aplikasi skala nilai untuk menilai hasil kebijakan dan program. Evaluasi bertujuan untuk memonitor, mensistematisasikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah, serta memastikan pejabat bertindak secara efisien dan bertanggung jawab. Evaluasi ini melibatkan penilaian menyeluruh dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, membandingkan kriteria dengan pencapaian, dan memberikan arahan untuk perbaikan jika diperlukan. Evaluasi kebijakan dilakukan tidak hanya pada tahap akhir tetapi sepanjang seluruh proses kebijakan, termasuk pada tahap perumusan masalah.



Sumber : (Abdoellah & Rusfiana, 2016)

Gambar 1. Tahap Kebijakan

Gambar diatas bisa dijelaskan bahwa kebijakan publik masih dalam bentuk UU/Perda, yang nantinya akan lebih di perjelas dalam kebijakan publik. Penjelas atau sering kita sebut dengan peraturan pelaksanaan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program serta diturunkan lagi dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dikenai program tersebut.

Dalam mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu indikator untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut.

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

Tipe kreteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efetivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efesiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk menncapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya manfaat
Efesiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk menncapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap (masalahtipe 1)efektivitas tetap (masalah tipe 2)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok tertentu?	Kreteria pareto kreteria kaldor
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok kelompok tertentu?	Konsitensi dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program publlik harus merata dan efesien

Sumber : (Dunn, 2015)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kriteria evaluasi kebijakan publik meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan kebijakan tercapai sesuai harapan. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas dengan biaya minimal. Kecukupan menilai sejauh mana kebijakan memuaskan kebutuhan dan nilai yang ada. Pemerataan berfokus pada distribusi keadilan dalam dampak kebijakan. Responsivitas mengukur tanggapan masyarakat terhadap kebijakan, mencerminkan seberapa baik kebijakan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Ketepatan menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang tepat dan memberikan manfaat yang diharapkan. Dalam penelitian ini, fokus akan diletakkan pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas, karena kriteria-kriteria ini dianggap paling relevan untuk menilai kinerja kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari adanya evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan diantaranya untuk mengukur efektivitas kebijakan. Salah satu tujuan utama evaluasi yaitu melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menentukan apakah kebijakan tersebut efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya evaluasi mencakup penilaian terhadap seberapa efisien kebijakan-kebijakan tersebut dalam menggunakan sumber daya, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja, dan apakah kebijakan telah memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal (Azam Jaysurrohman et al., 2021). Hasil dari evaluasi juga ditujukan untuk program itu sendiri, yaitu untuk kepentingan penyusunan program berikutnya, atau pun untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

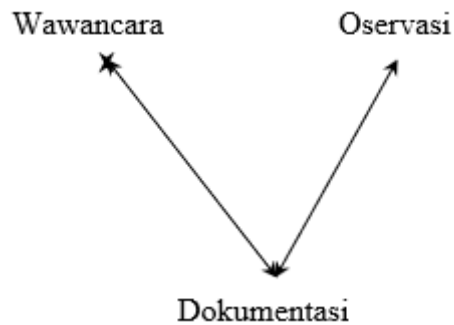
Dalam evaluasi, terdapat prinsip penting yang melibatkan hubungan erat antara tiga komponen: tujuan, proses, dan evaluasi. Pertama, hubungan antara tujuan dan proses/kegiatan menunjukkan bahwa setiap proses atau kegiatan yang dirancang harus selalu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya, tujuan harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kegiatan yang spesifik. Kedua, hubungan antara tujuan dan evaluasi berarti bahwa evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Dalam merumuskan alat evaluasi, harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, hubungan antara proses/kegiatan dan evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi harus disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan agar tepat sasaran. Selain itu, untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan, evaluasi diperlukan sebagai alat pengukur.

Sedangkan, gelandangan adalah individu yang hidup di luar norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tanpa tempat tinggal atau pekerjaan tetap, serta sering berpindah-pindah dan tinggal di tempat umum. Di sisi lain, pengemis adalah mereka yang mencari nafkah dengan meminta-minta di depan umum, berharap belas kasihan dari orang lain dengan berbagai alasan. Masyarakat gelandangan terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian tidak tetap, sering dianggap rendah oleh masyarakat luas, dan tindakan serta norma yang mereka lakukan dianggap tidak pantas.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi dan observasi, peneliti menggunakan sampel sumber data seperti wawancara dengan pegawai dan kepala panti serta juga melibatkan klien didalam panti, setelah didapatkan data yang valid dan diuji kebenarannya lalu memeriksa keabsahan data. Berikut dibawah adalah gambar campuran triangulasi tiga sumber data Wawancara, Observasi, Dokumen:



Sumber : (Sugiyono, 2013)

Gambar 2. Triangulasi Data

DISKUSI

1. Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program

Mengetahui program itu berhasil atau tidaknya tentunya diperlukan kebijakan evaluasi program untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Data hasil evaluasi yang telah diperoleh, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan hasil evaluasi yang dipaparkan berdasarkan indikator willliam Dunn yaitu, Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Ketepatan.

- 1) Efektivitas atau (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Evaluasi yang dilakukan efektifitas digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan dari program dan bisa dibilang efektif yang diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Menentukan berhasil tidaknya Program Panti rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Cisarua Bandung Barat sangat menentukan indikator efektivitas pelayanan yang dilakukan pihak panti.
- 2) Efisiensi di sini berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil efisiensi yang dimaksudkan adalah usaha jangka waktu yang diperlukan oleh tim pelaksanaan program Rehabilitasi, namun pada kenyataannya peneliti menemukan hasil lapangan bahwa proses program panti rehabilitasi hanya 4 bulan dalam satu angkatan, karena cepatnya waktu pelaksanaan program pelatihan membuat klien yang mengikuti program tidak dapat menyerap materi yang diberikan engan cepat dan dapat di katakan bahwa indikator efisien dari pelaksanaan program tersebut masih kurang maksimal dikarenakan target jangka waktu yang sangat singkat, ini membuat klien yang mengikuti program kemungkinan bisa saja kembali kejalan.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- 3) Kecukupan dalam kebijakan publik mengacu pada sejauh mana hasil program dapat memenuhi kebutuhan dan harapan yang diinginkan. Untuk program panti, kriteria kecukupan menilai apakah program dapat menjawab persoalan gelandangan dan pengemis secara efektif. Evaluasi menunjukkan bahwa program panti belum optimal karena durasi yang terlalu pendek, yaitu 4 bulan per angkatan. Pihak panti berencana memperpanjang periode program dan menyalurkan klien ke tempat kerja yang telah bekerja sama. Meskipun bantuan sosial pemerintah penting, ada ketidakseimbangan antara anggaran pemerintah dan anggaran panti, menyulitkan pengembangan sarana dan pelayanan sosial.
- 4) Kriteria perataan (equity) biasa juga disebut dengan kesamaan. Perataan memfokuskan kepada distribusi dari suatu jenis program yang diterapkan, memberikan penggambaran misalnya apakah biaya atau anggaran yang ada dapat didistribusikan secara merata kepada target yang telah. Indikator perataan kebijakan evaluasi program untuk memfokuskan anggaran kepada klien atau untuk pembaharuan fasilitas UPTD Panti.
- 5) Responsivitas (responsiveness) adalah seberapa suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. Kriteria reponsivitas kemudian menjadi penting karena dari penilaian ini akan dapat memuaskan kriteria-kriteria sebelumnya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan dan perataan, karena jika kriteria ini yang gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat dipastikan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- 6) Kriteria ketepatan (appropriateness), berbicara mengenai apakah hasil yang dicapai mendatangkan manfaat, secara keseluruhan melaksanakan evaluasi kebijakan program Panti untuk mendapatkan keberhasilan dengan indikator ini diharapkan mendapatkan jawaban dari semua indikator-indikator diatas.
- 7) Indikator ketepatan Gelandangan dan pengemis yang jumlahnya terus meningkat, pemerintah melalui Dinas Sosial telah melakukan upaya dengan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Sosial Bina Karya tepatnya di Bandung Barat. Harapannya dengan bekal keterampilan yang didapatkan klien bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan hidup lebih baik, namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, program ini kurang bisa berjalan maksimal.

2. Upaya Pada Pihak Panti Dalam Mengevaluasi Kebijakan Program

Tercapainya suatu keberhasilan mengevaluasi kebijakan program pihak UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Bandung Barat mempunyai upaya mewujudkannya, dari sini kita tahu apa yang program perlu dihapuskan maupun ditambahkan. Satu hal yang dapat diperhatikan bahwa keberhasilan klien pada satu sisi dengan memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan setelah keluar panti, namun disisi lain sebagian dari mereka tidak mau pulang ke kampung halamannya, karena sudah merasa nyaman dan berpenghasilan di kota besar, lahan.



3. Pengawasan Pihak Panti

Pengawasan kepada klien setelah melaksanakan program merupakan salah satu langkah dari pihak panti untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksanakan dengan baik serta untuk memastikan bahwa para klien tidak kembali lagi kejalanan, dan bantuan berupa alat usaha yang diberikan kepada klien masih berjalan atau tidak. Pemantauan setelah program atau monitoring biasanya para aparatur langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri, ataupun kerumah klien karena dari beberapa klien ada yang membuka usaha dirumah masing masing, tetapi tidak semua terpantau oleh pihak panti karena jumlah klien tidak seimbang dengan jumlah pekerja sosial yang memantau. Monitoring seharusnya dilakukan secara berkala dan tepat waktu dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk memastikan setiap klien yang sudah memulai usaha tidak berhenti dan tidak kembali lagi kejalanan. Jika ketika proses monitoring ada yang kembali lagi kejalanan, segera analisa faktor dan kendala serta adakan tindaklanjut dari hasil monitoring tersebut.

4. Faktor Pendukung

Adanya Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 mengenai Fakir Miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Tambahan peraturan pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dan di daerah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tempat yang sangat strategi ditengah pemukiman masyarakat dan disertai fasilitas yang cukup memadai, dari tempat tinggal klien hingga taman bermain anak-anak, Adanya inovasi terbaru program Kamu Muda Berkelanjutan yang akan 80% membuat para gelandangan dan pengemis tidak lagi kembali kejalanan melainkan akan disalurkan ketempat tempat sesuai keterampilan yang mereka pelajari di Panti dan Beberapa rumah pekerja sosial terletak di dalam panti dan bisa langsung memantau para klien kalau sedang tidak ada kegiatan.

5. Faktor Penghambat

Tidak ada kejelasan bagi anak klien yang sedang mengikuti program/keterampilan di Panti, mereka dibiarkan bermain-main tanpa memikirkan pendidikan. Perbandingan antara jumlah klien dengan sumber daya sehingga tidak efektifnya suatu program yang dijalankan. Klien yang kurang cepat untuk menangkap apa yang diterangkan oleh instruktur dan pengisi materi hingga ada pula orang tua atau bisa disebut lansia yang tidak tahu bisa ikut atau tidak dalam mengikuti pelatihan. Anggaran diberikan oleh Dinas Sosial setempat sehingga menghambat pelaksanaan program contohnya seperti mereka hendak pulang ke kampung halaman tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak punya rumah. Waktu pelaksanaan yang dirasa terlalu singkat dengan jangka waktu 4 bulan dalam satu angkatan.

6. Hasil Penelitian Terhadap Evaluasi Kebijakan Program

Peneliti menemukan bahwa ada kriteria-kriteria evaluasi yang sudah tercapai tetapi ada juga yang menunjukkan belum tercapai, beberapa program harus dihapuskan dan ditambahkan dengan program baru namun sebagian besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kriteria evaluasi dari setiap indikator sudah tercapai, tidak bisa dipungkiri dengan adanya program atau inovasi Kamu Muda Juara Berkelanjutan bisa membuat para



gelandangan dan pengemis tidak lagi kemabali kejalanan, karena mereka langsung disalurkan ketempat kerja yang sudah bekerjasama dengan pihak dinsos. Tahap sosialisasi dan resosialisai, potensi di daerah perlu digali dan dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi klien ketika sudah kembali ke masyarakat, kerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk memfasilitasi klien dalam mengembangkan potensinya di daerah asal, sesuai dengan keterampilan yang dimiliki perlu dilakukan.

Melalui koordinasi dan kerjasama ini diharapkan dapat menuntaskan PMKS termasuk gelandangan dan pengemis, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial diharapkan dapat dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas unit dalam upaya preventif, rehabilitatif dan pembinaan lanjut pasca rehabilitasi sosial. Keberhasilan Panti Rehabilitasi Sosial bukan dilihat dari kesesuaian pekerjaan dengan jenis keterampilan yang diberikan di panti, tetapi perubahan pola hidup dan bekerja sesuai dengan norma norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan studi ini terlihat bahwa ada beberapa yang sudah bekerja sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak lagi menggelandang dan mengemis lagi.

Berikut adanya keberhasilan dari setelah evaluasi kebijakan program dengan adanya inovasi terbaru Kamu Muda Juara Berkelanjutan sebagai berikut:

- 1) Para gelandangan dan pengemis yang dipulangkan kekota atau kabupaten tidak langsung dipulangkan, mereka disalurkan langsung ketempat kerja yang sudah bekerja sama dengan dinas sosial atau dari pihak panti, dan mereka juga mendapatkan satu tahun pertama kontrakan yang diberikan oleh panti
- 2) Klien sudah mendapatkan pembekalan yang sangat terbaru seperti contoh yang dievaluasi adanya steam motor yang baru ditambahkan dan pembuatan susu kefir yang berguna untuk kekebalan tubuh klien dari virus.
- 3) Adanya bimbingan rohani hampir setiap sore dengan adanya bimbingan ini yang intens akan perlahan lahan merubah pola pikir dengan cepat, pihak panti berharap dengan bimbingan rohani ini para klien bisa melakukan wajibnya dengan sholat tepat waktu berjamaah.

7. Hasil Penelitian Terhadap Upaya Dalam Mengevaluasi Kebijakan Program

Program bimbingan yang dilaksanakan di UPTD Panti tersebut sedikit banyak tentunya telah mengalami peningkatan serta memberikan pengaruh besar kepada para klien. Klien semakin memahami hakikat baik sebagai makhluk tuhan maupun makhluk sosial. Para klien tersebut semakin memahami berbagai ilmu pengetahuan, seperti pengetahuan agama, pengetahuan sosial, pengetahuan umum, ataupun kedisiplinan. Diantaranya mereka sedikit banyak telah memperoleh berbagai keterampilan dan dapat melakukan sholat lima waktu dan mandi secara rutin, mengikuti kegiatan membaca Surat Yasin setiap malam jum'at, melakukan kegiatan siraman kerohanian, juga mereka sedikit demi sedikit dapat merubah pola tingkah lakunya yang pada awalnya jauh dari kata “baik” seperti misalnya mereka bisa meredam amarah ketika terjadi perselisihan antar sesama klien, karena pada mulanya mereka sering melakukan tindak kekerasan bahkan sering menggunakan senjata tajam ketika terjadi pertengkaran antar mereka. Hal ini seperti yang pernah dialami oleh beberapa klien yang pada waktu itu sempat kehilangan sandalnya dan pada akhirnya mereka dipanggil oleh pihak Panti



dan diberikan sanksi dan juga peringatan keras berupa ancaman dikeluarkan dari Panti atau berhadapan dengan pihak yang berwajib.

Evaluasi kebijakan program yang sudah kelihatan dengan adanya program yang berjudul “Kamu Muda Juara Berkelanjutan” Klien yang sudah dibina atau menerima pelatihan mereka tidak perlu khawatir dengan adanya inovasi terbaru klien langsung disalurkan ketempat kerja yang sudah bekerja sama dengan pihak dinas sosial setempat, serta kepala panti berjanji mengusahakan dengan memebri kontrakan atau kosan dengan pembayaran tahun pertama akan dibayarkan oleh pihak panti, tentu saja itu menambah anggaran dan pihak panti lagi mengusahakan anggaran tersebut, dengan itu klien yang tidak memiliki tempat tinggal tidak lagi luntang lantung dijalan

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan evaluasi program gelandangan dan pengemis oleh Panti melibatkan berbagai kegiatan pembinaan seperti pelayanan, rehabilitasi, bimbingan spiritual, fisik, sosial, mental, dan keterampilan, dengan tujuan utama "Memanusiakan Manusia". Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis serta mengurangi dampak negatifnya di masyarakat. Klien yang tidak memiliki dokumen identitas atau kartu keluarga diberikan surat-surat setelah keluar dari panti, dan pembuatan kartu kesehatan seperti BPJS masih dalam proses pengajuan. Evaluasi kebijakan program di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK) Cisarua Bandung Barat menunjukkan hasil yang baik, terutama dengan program baru "KAMU MUDA JUARA BERKELANJUTAN" yang berfokus pada pengembangan kawasan kampus untuk kaum duafa. Program ini menawarkan tempat tinggal gratis selama satu tahun dan peluang kerja di tempat yang sudah bekerja sama dengan panti, dengan harapan klien tidak kembali ke jalan.

Saran untuk perbaikan termasuk menyeimbangkan jumlah pekerja sosial dengan klien, memberikan kegiatan edukasi tambahan untuk anak-anak yang tidak mengikuti program, serta meningkatkan bimbingan mental dan sosial melalui berbagai aktivitas. Perlu ada standar kompetensi dalam pembinaan dan evaluasi bulanan perkembangan klien. Program yang tidak efektif sebaiknya dievaluasi dan diganti dengan inovasi baru. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diharapkan memantau perkembangan program setiap enam bulan sekali. Pihak panti sebaiknya mempertimbangkan perpanjangan waktu program dari empat bulan untuk memastikan perubahan perilaku yang maksimal. Masyarakat juga diminta untuk mendukung program pemerintah dengan memberikan bantuan kepada yayasan atau panti sosial daripada langsung kepada gelandangan dan pengemis, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019.

REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Ananda, R., Rafida, T., & Wijaya, C. (2017). Pengantar evaluasi program pendidikan.
- Arifin, I. Z., Muhafidi, D., & Rosmajudi, A. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 – 2022. Indonesian Journal Of Education And Humanity, 3(4).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Azam Jaysurrohman, R., Supandi, M., Tedi Wardani, M., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). PROBLEMATIKA DALAM EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. In BINTANG : Jurnal Pendidikan dan Sains (Vol. 3, Issue 2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. routledge.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13–26.
- Mesiono, M. (2017). Dalam tinjauan evaluasi program. Educators: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan, 4(2), 2–21.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

